

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN TABANAN TA 2014

Denpasar, Rabu (3/6) – Memenuhi ketentuan undang-undang, bertempat di Ruang Rapat Lantai III Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, BPK Perwakilan Provinsi Bali melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tabanan untuk Tahun Anggaran (TA) 2014.

LHP atas Laporan Keuangan tersebut terdiri dari tiga bagian yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

1. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2014 yang memuat Opini Pemeriksaan;
2. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2014; dan
3. LHP atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2014.

Dalam LHP yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bali, Arman Syifa kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Wayan Gindera, dan Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, **BPK menyatakan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2014.**

BPK dalam memberikan opini pemeriksaan setidaknya didasarkan atas empat hal, yaitu:

1. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2014, BPK berpendapat bahwa Neraca Pemerintah Kabupaten Tabanan, per tanggal 31 Desember 2014, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

Meskipun demikian, BPK masih menemukan beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang ditemukan BPK, sebagai berikut:

1. Penatausahaan Pendapatan dan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Tabanan Tidak Tertib;
2. Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Pemerintah Kabupaten Tabanan Tidak Tertib;
3. Pengelolaan Piutang Lainnya pada Badan Rumah Sakit Umum Tabanan Tidak Tertib;
4. Pemanfaatan Aset Tetap Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tabanan Tidak Memberikan Kontribusi Kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan; dan
5. Pengelolaan Dana Pendidikan Sekolah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tidak Melalui Mekanisme APBD.

Selain itu terdapat pula beberapa kelemahan yang dijelaskan dalam laporan BPK berupa temuan kepatuhan, antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Tabanan kehilangan potensi pendapatan pajak restoran atas usaha yang belum terdaftar sebagai wajib pajak;
2. Terdapat Pelaksanaan Pembangunan Gedung yang Belum Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai; dan
4. Mekanisme Pemberian Hibah yang tidak sesuai ketentuan.

Namun, BPK juga mengapresiasi upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Tabanan, dimana sebagian besar tindak lanjut atas rekomendasi BPK telah sesuai dengan *action plan* yang dibuat oleh Bupati Tabanan, sehingga dalam LKPD TA 2014 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan.

BPK akan tetap mendorong Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sesuai rekomendasi, untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah secara sistemik dan konsisten, termasuk dalam hal ini penerapan basis akrual dalam pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah yang sudah diterapkan mulai tahun 2015.

Humas BPK Perwakilan Provinsi Bali

Ida Ayu Putu Risnawati (Kepala Subbagian Humas dan TU)

Telp. +62 361 229193 • Fax. +62 361 229184, 256205

Web. <http://denpasar.bpk.go.id>

Email. dayu_risna@yahoo.com